



Telaah
Kebijakan

KRISIS LAPANGAN KERJA

MELINDUNGI HAK EKONOMI GENERASI MUDA MENUJU INDONESIA EMAS

Job
Opportunity
EMPLOYMENT

Oleh: Muda Bicara ID



Krisis Lapangan Kerja Kaum Muda: Melindungi Hak Ekonomi Generasi Muda Menuju Indonesia Emas

Pengarah:

- Moch Edward Trias Pahlevi

Editor dan Kurator :

- Muhammad Iqbal Khatami

Peneliti :

- Muhamad Fikri Asy'ari
- Karen Rianika Tanuwijaya
- Raihan Aditya Ramadhan

Penyuntingan dan Tata Letak: Muda Bicara ID

www.mudabicara.id

Dipublikasikan Agustus 2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia berpeluang besar mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan proyeksi PDB mencapai US\$8,89 triliun dan pendapatan per kapita US\$30.300. Bonus demografi, di mana mayoritas penduduk berada pada usia produktif (15–64 tahun), menjadi modal utama. Namun, peluang ini terancam gagal jika pemerintah tidak segera menanggulangi krisis lapangan kerja, khususnya bagi kaum muda.

Situasi dan Tantangan Utama:

- Pengangguran terbuka mencapai 7,28 juta orang, dengan tingkat tertinggi pada kelompok usia muda 15–24 tahun (16,16%).
- Setiap tahun, hanya 3,59 juta lapangan kerja baru tersedia, sementara angkatan kerja bertambah jauh lebih besar, menciptakan defisit sekitar 3,69 juta orang.
- Perkembangan AI membawa peluang efisiensi, tetapi juga ancaman otomatisasi dan PHK pada pekerjaan rutin.
- Rasio kewirausahaan rendah (3,57%), meski minat anak muda tinggi.
- Dominasi sektor informal (57,95%) menekan produktivitas, penerimaan pajak, dan memperlebar ketimpangan.
- Mismatch kualifikasi menciptakan pengangguran terselubung, khususnya bagi lulusan tinggi yang merasa overqualified.
- Kebijakan efisiensi anggaran menekan stimulus fiskal dan daya beli, sehingga memperlambat pertumbuhan lapangan kerja baru.

Implikasi:

Tanpa intervensi cepat, Indonesia berisiko mengalami kegagalan bonus demografi, seperti yang dialami Afrika Selatan dan Brasil, alih-alih mengikuti jejak sukses Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.

Rekomendasi Kebijakan Kunci:

1. Penguatan keterampilan kerja dan adaptasi teknologi, termasuk pelatihan AI di desa dan kota.
2. Peningkatan rasio kewirausahaan melalui infrastruktur usaha, akses modal, dan dukungan UMKM naik kelas.
3. Mengurangi mismatch pendidikan dan kebutuhan industri dengan kurikulum terintegrasi dan riset pasar kerja.
4. Reformasi proses rekrutmen: transparan, digital, sederhana, dan berpayung hukum tegas tanpa diskriminasi.
5. Penguatan sektor formal dengan target minimal 50% tenaga kerja formal untuk menyeimbangi dominasi sektor informal



Prabowo Klaim Angka Pengangguran Terendah Sejak '98, Benarkah?

Pada pidato kenegaraan 15 Agustus 2025 di Ruang Rapat Paripurna MPR-DPR, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa tingkat pengangguran nasional Indonesia berada pada titik terendah sejak krisis moneter 1998. Meskipun tidak menyebutkan angka persentase, data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada **Februari 2025 sebesar 4,76%, lebih rendah dibandingkan Agustus 1998 yang mencapai 5,46%.**

Namun, dilansir dari Tempo, Qisha Quarina, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), menilai penurunan TPT tidak serta-merta mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang benar-benar baik.

Pasalnya, jumlah penganggur secara absolut justru meningkat dari 7,2 juta orang pada Februari 2024 menjadi 7,28 juta orang pada Februari 2025.

Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah penganggur. **Dengan demikian, meskipun TPT menurun, jumlah penganggur tetap bertambah.**





Sengkarut Persyaratan dan Proses Pendaftaran Kerja

Baru-baru ini pemerintah mengesahkan aturan baru: larangan mencantumkan batas usia dalam rekrutmen tenaga kerja. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja. Aturan ini sejatinya menjadi langkah maju untuk membuka akses kerja yang lebih adil bagi semua kalangan.

Meski regulasi sudah ada untuk mencegah diskriminasi, persoalan nyata di lapangan masih menyangkut:

- Ketidaktaatan pada aturan – banyak instansi/ perusahaan belum patuh.
- Persyaratan yang tidak wajar – syarat sering kali tidak sesuai kebutuhan pekerjaan.
- Upah tidak transparan – calon pekerja sulit mengukur kelayakan penawaran.
- Proses berbelit – lamaran kerja cenderung panjang, melelahkan, dan berbiaya.



Skala Lapangan Kerja bagi Kaum Muda

Data terbaru BPS (2025) menyebutkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang, naik 1,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, kelompok usia muda mendominasi:

- **Usia 15-24 tahun: 16,16% menganggur → tingkat tertinggi.**
- **Usia 25-59 tahun: 3,04% menganggur.**

Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda adalah kelompok paling rentan terhadap pengangguran.

Jika dibandingkan, jumlah lapangan kerja yang tercipta setiap tahun (3,59 juta) masih kalah jauh dengan jumlah pencari kerja baru dan penganggur yang butuh pekerjaan. Ada selisih sekitar 3,69 juta orang per tahun yang tetap tidak terserap pasar kerja. Akibatnya, anak muda yang baru lulus harus bersaing ketat dengan penganggur lama, sehingga persaingan semakin berat.

Upaya pemerintah seperti job fair, pelatihan keterampilan, hingga program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) memang sudah berjalan, tetapi belum memberi dampak signifikan. Model pembangunan sebelumnya yang berfokus pada perusahaan besar juga terbukti tidak cukup menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar, terutama bagi kelompok muda dengan keterampilan terbatas.



PERINGATAN PENTING!

- Indonesia bisa gagal memanfaatkan bonus demografi, seperti yang dialami Afrika Selatan dan Brasil, jika masalah pengangguran muda tidak segera ditangani.
- Sebaliknya, ada contoh sukses seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia yang berhasil mengoptimalkan tenaga muda melalui penciptaan lapangan kerja produktif, peningkatan keterampilan, dan dukungan ekosistem industri.
- Karena itu, pemerintah harus segera memperluas skala penciptaan lapangan kerja yang layak, terutama bagi usia muda, agar bonus demografi Indonesia 2045 benar-benar menjadi peluang, bukan ancaman.



Rasio Kewirausahaan di Indonesia Masih Rendah

Kewirausahaan memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja. Seorang wirausaha bukan hanya menghidupi dirinya sendiri, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi orang lain. Berdasarkan data BPS, kontribusi UMKM terhadap lapangan kerja adalah sebagai berikut:

Kontribusi usaha:

- Usaha mikro: mempekerjakan 1–5 orang
- Usaha kecil: 5–19 orang
- Usaha menengah: 20–99 orang

Ratio Kewirausahaan

- Rasio kewirausahaan: baru 3,57%, tertinggal dari Malaysia & Thailand ($\pm 4\%$) dan jauh di bawah Singapura (8,6%).

Minat Berwirausaha

- 35,5% pemuda (usia 15–35 tahun) ingin jadi pengusaha (Kemenko Perekonomian, 2022).

Lalu, apa masalahnya?

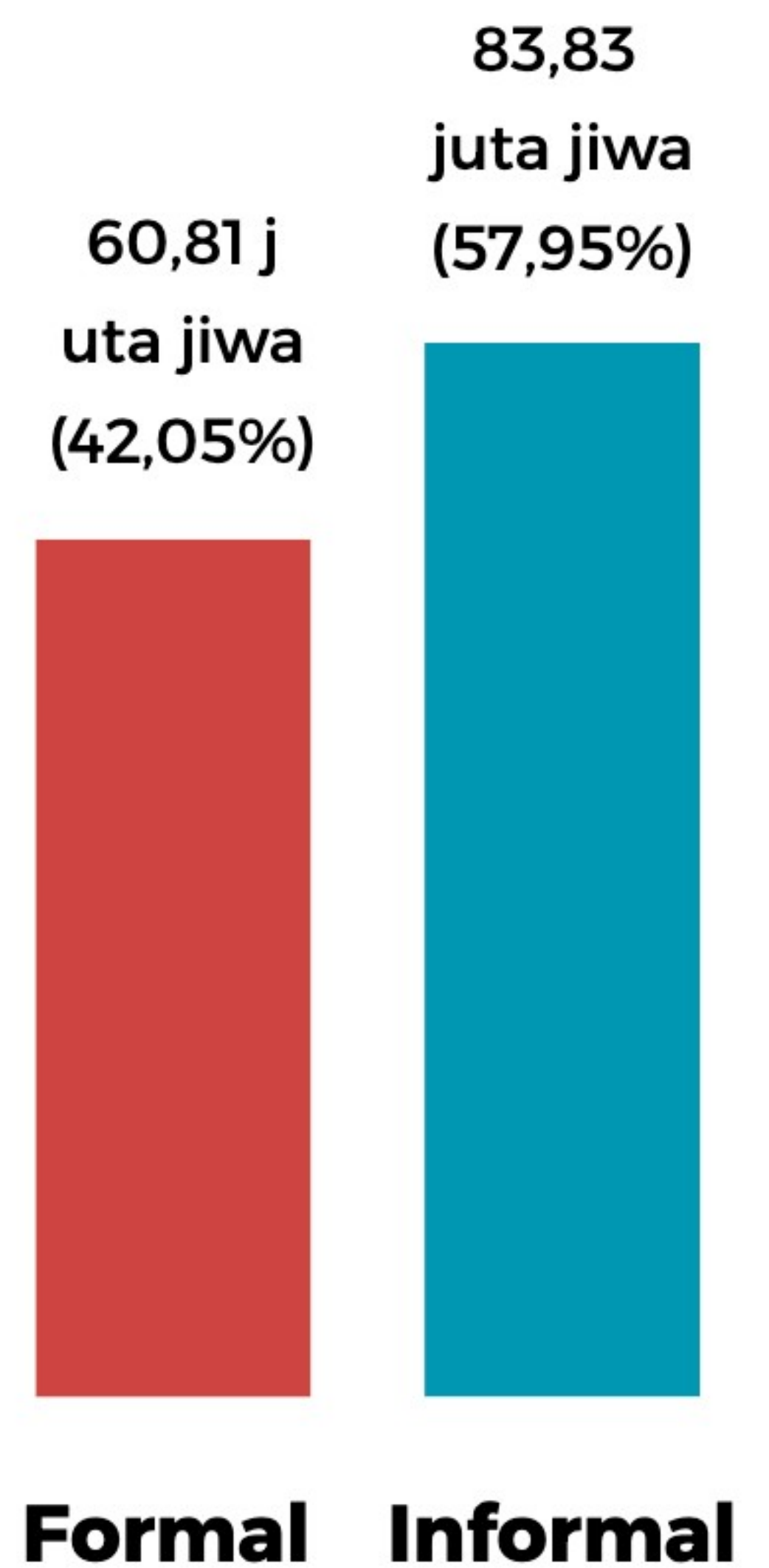
1. Modal terbatas → sulit memulai atau mengembangkan usaha.
2. Keterampilan dan pengetahuan bisnis masih kurang.
3. Dukungan pemerintah belum optimal, banyak kebijakan hanya di atas kertas.
4. UMKM kesulitan untuk “naik kelas”, meliputi masalah:
 - Sulit mendapat pinjaman bank (akses pembiayaan formal).
 - Pasar masih terbatas, sulit tembus skala nasional /internasional.
 - Persaingan tidak sehat
 - Minim pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan produksi.



Memaksa Warga Berwirausaha, Tanpa Optimalisasi Sektor Formal adalah Keliru

Indonesia perlu memastikan setidaknya 50% tenaga kerja berada di sektor formal agar produktivitas meningkat dan penerimaan pajak negara lebih kuat. Saat ini pekerja formal baru 42,05% (60,81 juta jiwa).

Peningkatan proporsi ini menjadi salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.



Dampak Ketidakseimbangan Pekerja Formal dan Informal

- Produktivitas nasional cenderung rendah.
- Pendapatan negara dari pajak berkurang (sektor informal tak tercatat resmi).
- Memperparah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Pemerintah Perlu Menyeimbangkan Aspek-Aspek Berikut

- Fokus penguatan makro ekonomi sektoral.
- Mendorong transisi dari sektor informal ke formal melalui penguatan regulasi, seperti misalnya memperjelas regulasi terkait pekerja pengemudi ojek daring
- Penguatan kewirausahaan agar dapat naik kelas dan membuka lapangan kerja baru
- Penciptaan pekerjaan layak serta peningkatan produktivitas tenaga kerja



Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan Kemampuan (Overqualified)

Selama ini ada anggapan bahwa pengangguran terjadi karena kemampuan tenaga kerja yang rendah. Padahal, **data BPS menunjukkan bahwa pekerja dengan pendidikan rendah justru tetap terserap dalam jumlah besar:**

- **Sekitar 35,89% atau 52,31 juta orang merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah, menjadi kelompok terbesar dalam tenaga kerja nasional (Next Indonesia, 2025).**
- **Sebanyak 10,44% atau sekitar 15,22 juta lulusan Diploma IV hingga Strata 3 (S1, S2, dan S3) menjadi bagian dari total angkatan kerja.**
- **Sementara itu, 2,39% atau sekitar 3,48 juta orang merupakan lulusan Diploma I, II, dan III yang terserap dalam angkatan kerja**

Temuan ini menegaskan bahwa masalah sebenarnya bukan hanya kemampuan rendah, tetapi justru ketidaksesuaian antara kualifikasi dan jenis pekerjaan yang tersedia. Banyak lulusan pendidikan tinggi merasa overqualified, sehingga menolak pekerjaan yang dianggap tidak sepadan dengan keterampilan atau ekspektasi mereka.

Faktor lain yang memperburuk situasi adalah pengaruh media sosial. Pencari kerja sering membandingkan diri dengan teman sebaya yang mendapatkan pekerjaan bergengsi, sehingga muncul rasa enggan atau malu menerima pekerjaan yang dianggap kurang prestisius.



Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, yaitu pemangkasan sejumlah pos belanja negara demi menghemat pengeluaran.

Secara teori, cara klasik untuk merangsang ekonomi adalah fiskal ekspansif, di mana belanja negara ditingkatkan sehingga memicu multiplier effect. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah akan berputar kembali melalui konsumsi dan investasi masyarakat, sehingga pendapatan nasional naik lebih besar daripada belanja awal.

Namun, dengan kebijakan efisiensi berdampak pada:

- **Belanja pemerintah berkurang → uang yang beredar menurun.**
- **Multiplier effect melemah → aktivitas ekonomi tidak mendapat dorongan.**
- **Situasi makin tertekan karena kenaikan pajak di hampir semua sektor, yang menekan daya beli masyarakat.**

Rekomendasi Kebijakan Dalam Menanggulangi Krisis Lapangan Kerja

1. Penguatan Keterampilan dan Adaptasi Teknologi

- Menyelenggarakan program pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, termasuk pemanfaatan AI dan teknologi digital.
- Memanfaatkan potensi pemuda di desa maupun perantau sebagai agen pelatih/instruktur keterampilan.
- Memberikan akses luas terhadap informasi pasar kerja, peluang pelatihan, dan platform digital ketenagakerjaan.

2. Peningkatan Rasio Kewirausahaan

- Membangun pusat kewirausahaan di daerah untuk menyediakan wadah ide, workshop, konsultasi, dan pendampingan UMKM.
- Mendukung kolaborasi UMKM melalui integrasi rantai pasok, teknologi, akses pembiayaan, serta akses pasar domestik maupun global.
- Memberikan insentif fiskal dan non-fiskal agar UMKM dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar pada penciptaan lapangan kerja.

3. Mengurangi Mismatch Pendidikan dan Dunia Usaha

- Mengintegrasikan kurikulum pendidikan menengah dan tinggi dengan kebutuhan kompetensi dunia kerja yang terus berubah.
- Memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang merekrut tenaga kerja dari latar belakang dan keterampilan yang beragam.
- Mengembangkan sistem riset pasar kerja untuk memantau tren ketenagakerjaan secara berkala, termasuk dampak disrupsi teknologi.



4. Reformasi Proses Rekrutmen Kerja

- Menerapkan sistem rekrutmen digital yang terintegrasi: pendaftaran, seleksi, hingga wawancara untuk mengurangi biaya dan durasi rekrutmen.
- Meningkatkan transparansi, dengan mewajibkan pencantuman gaji, tunjangan, dan alasan ketidaklolosan seleksi.
- Mengubah larangan persyaratan batas usia dari sekadar Surat Edaran menjadi regulasi hukum yang mengikat, disertai mekanisme sanksi bagi pelanggar.

5. Penguatan Sektor Formal sebagai Penyeimbang

- Mendorong penyusunan dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang menekankan transisi pekerja informal ke formal.
- Menetapkan target minimal 50% tenaga kerja berada di sektor formal untuk menyeimbangi dominasi sektor informal.
- Memberikan insentif dan kemudahan regulasi bagi penciptaan lapangan kerja formal di berbagai sektor produktif.





KESIMPULAN

- Bonus demografi memberi peluang emas bagi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, namun berisiko gagal dimanfaatkan jika pengangguran muda tidak segera diatasi.
- Tingkat pengangguran masih tinggi (7,28 juta orang), dengan porsi terbesar berasal dari usia 15-24 tahun (16,16%).
- Jumlah lapangan kerja yang tercipta (3,59 juta per tahun) masih lebih kecil dari jumlah pencari kerja baru, menciptakan defisit sekitar 3,69 juta orang per tahun.
- AI memberi peluang efisiensi, tetapi juga ancaman pemutusan hubungan kerja, terutama pada pekerjaan repetitif.
- Rasio kewirausahaan masih rendah (3,57%), jauh tertinggal dari negara tetangga, meski minat wirausaha anak muda cukup tinggi.
- Dominasi sektor informal (57,95%) menyebabkan produktivitas rendah, pajak hilang, dan ketimpangan melebar. Target minimal 50% pekerja formal diperlukan sebagai syarat Indonesia Emas.
- Mismatch (ketidaksesuaian kualifikasi) memperparah pengangguran: banyak lulusan tinggi menganggur karena ekspektasi tak sesuai dengan jenis pekerjaan yang tersedia.
- Efisiensi anggaran pemerintah yang memangkas belanja negara melemahkan stimulus ekonomi, apalagi ditambah kenaikan pajak yang menekan daya beli.



REFERENSI

- Amarthia. (2024, 15 Februari). Kenali Perbedaan UKM dan UMKM. Amarthia Blog. Diakses tanggal 13 Agustus. <https://amartha.com/blog/work-smart/kenali-perbedaan-ukm-dan-umkm/>
- Annisa, F. (2025, Mei 5). BPS: Jumlah Pengangguran Naik Jadi 7,28 Juta Orang per Februari 2025. Tempo.co. Diakses tanggal 11 Agustus. https://www.tempo.co/ekonomi/bps-jumlah-pengangguran-naik-jadi-7-28-juta-orang-per-februari-2025-1344338#goog_rewarded
- Bloomberg Technoz. (2025, 5 Mei). Ada 3,59 juta lapangan kerja baru di Februari 2025 tercipta. Bloomberg Technoz. Diakses tanggal 12 Agustus. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/70267/ada-3-59-juta-lapangan-kerja-baru-di-februari-2025-tercipta>
- Budiawan, S.A. (2025, Mei 18). Generasi Muda dan Kelompok Pendidikan Tinggi Kian Mendominasi Pengangguran di Indonesia. Kompas.id. Diakses tanggal 11 Agustus. <https://www.kompas.id/artikel/generasi-muda-dan-kelompok-pendidikan-tinggi-kian-mendominasi-pengangguran-di-indonesia>
- CNN Indonesia. (2025, 9 Januari). Siap-siap, 41 persen perusahaan bakal PHK karyawan imbas AI pada 2030. CNN Indonesia. Diakses tanggal 12 Agustus. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250109114654-92-1185361/siap-siap-41-persen-perusahaan-bakal-phk-karyawan-imbai-ai-pada-2030/amp>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022). Pemerintah perkuat ekosistem kewirausahaan yang berorientasi pada nilai tambah dan pemanfaatan teknologi. ekon.go.id. Diakses tanggal 13 Agustus. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3677/pemerintah-perkuat-ekosistem-kewirausahaan-yang-berorientasi-pada-nilai-tambah-dan-pemanfaatan-teknologi>
- kumparanBISNIS. (2025, 12 Maret). Kalah dari Malaysia dan Singapura, Rasio Wirausaha RI Baru 3,57 Persen. kumparanBISNIS. Diakses tanggal 13 Agustus. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kalah-dari-malaysia-dan-singapura-rasio-wirausaha-ri-baru-3-57-persen-24fl6OnNVXK/1>
- kumparanNEWS. (2024, 8 Agustus). Dirjen Dukcapil: Penduduk produktif 69,58%, modal besar menuju Indonesia Emas. Kumparan. Diakses tanggal 12 Agustus. <https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-dukcapil-penduduk-produktif-69-58-modal-besar-menuju-indonesia-emas-23HuXW4TpQW/1>
- Nurrahman, A. (2020). Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Pengangguran di Indonesia. Jurnal Registratie, 2(1), 1-8. <http://dx.doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v2i1.2559>
- Wardani, P.F., Siahaan, R.S., Krismayanti, Y., Hadiningrat, S.S. (2024). Lesson Learned dari Beberapa Negara yang Sukses Memanfaatkan Bonus Demografi. Jurnal Cakrawala Akademika, 1(4), 1205-1219. <https://doi.org/10.70182/JCA.v1i4.14>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Rencana Tenaga Kerja Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Kementerian Ketenagakerjaan RI. <https://satudata.kemnaker.go.id/publikasi/118>
- Kontan. (2024, 5 September). Pekerjaan sektor formal minim, pekerja informal mendominasi di Indonesia. Kontan. Diambil dari <https://nasional.kontan.co.id/news/pekerjaan-sektor-formal-minim-pekerja-informal-mendominasi-di-indonesia>
- Nasly, S. (2024, 22 Mei). Tantangan penerimaan pajak pekerja sektor informal. Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/tantangan-penerimaan-pajak-pekerja-sektor-informal>